

**PENGARUH PROPORSI KOMISARIS INDEPENDEN DAN KOMPOSISI
KOMITE AUDIT TERHADAP *EARNINGS MANAGEMENT*
(Studi pada Perusahaan Konglomerasi yang listing di Bursa Efek Indonesia)**

Makhdalena

*Pendidikan Ekonomi FKIP Universitas Riau
(Email: gelatik14@yahoo.co.id)*

Abstract: The bankruptcy of giant companies in the early 2000s due to accounting manipulation (earnings management). Earnings management is also happening in companies listed on the Indonesia Stock Exchange. And this makes accounting experts focused on independent commissioners and audit committee. The experts agree that an independent commissioner and the audit committee is an important issue related to earnings management through a substance that can be provided by the independent commissioners and audit committee. Earnings management can be reduced if it is supported by the proportion of independent and adequate audit committee composition. Based on these ideas, the researchers interested in conducting research that aims to determine the effect of the proportion of independent commissioners and audit committee composition to earnings management. The study was conducted on a conglomerate listed on the Indonesia Stock Exchange, amounting to 37 companies and all researched. The data used in this study is secondary data obtained from the annual report. Data were analyzed using path analysis. The results showed that the effect of the proportion of independent commissioners and audit committee composition on earnings management in conglomerate listed on the Indonesia Stock Exchange simultaneously is at 0013 while the rest of 0987 (1-0013) is influenced by other factors beyond the studied variables such as CEO compensation, capital market, block holders, the managerial labor market and internal control. Partially, the proportion of independent commissioners had no effect on earnings management, while the composition of the audit committee has very little impact on earnings management, which only amounted to 0013.

Keywords: Proportion of Independent Commissioner, Audit Committee Composition, Earnings Management, Corporate Governance

Abstrak: Bangkrutnya perusahaan raksasa dunia pada awal tahun 2000an disebabkan karena adanya manipulasi akuntansi (*earnings management*). *Earnings management* juga terjadi pada perusahaan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia. Dan ini membuat para pakar akuntansi memusatkan perhatian pada komisaris independen dan komite audit. Para pakar setuju bahwa komisaris independen dan komite audit merupakan isu penting yang berhubungan dengan *earnings management* melalui substansi yang dapat diberikan oleh komisaris independen dan komite audit. *Earnings management* dapat dikurangi apabila didukung oleh proporsi komisaris independen dan komposisi komite audit yang memadai. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh proporsi komisaris independen dan komposisi komite audit terhadap *earnings management*.

Penelitian dilakukan pada perusahaan konglomerasi yang listing di Bursa Efek Indonesia yang berjumlah 37 perusahaan dan semua diteliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari *annual report*. Data dianalisis dengan menggunakan *path analysis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh proporsi komisaris independen dan komposisi komite audit terhadap *earnings management* pada perusahaan konglomerasi yang listing di Bursa Efek Indonesia secara simultan adalah sebesar 0.013 sedangkan sisanya sebesar 0.987 (1- 0.013) dipengaruhi oleh faktor lain diluar variabel yang diteliti seperti kompensasi CEO, pasar modal, *block holders*, pasar tenaga kerja manajerial dan *internal control*. Secara parsial, proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *earnings management* sedangkan komposisi komite audit berpengaruh sangat kecil terhadap *earnings management*, yaitu hanya sebesar 0.013.

Kata kunci: Proporsi Komisaris Independen, Komposisi Komite Audit, *Earnings Management*, *Corporate Governance*

PENDAHULUAN

Sejak kejatuhan perusahaan-perusahaan raksasa dunia pada awal tahun 2000 seperti Peregrine Investment Holding di Hongkong, Baring Futures di Singapore, Enron Corporation di Amerika Serikat, dan HIH Insurance Company Ltd di Australia, maka perhatian dunia terhadap *corporate governance* mulai meningkat. Bangkrutnya perusahaan raksasa dunia diawal tahun 2000an ini disebabkan karena adanya manipulasi akuntansi (*earnings management*) yang telah merugikan begitu banyak pihak seperti: pemegang saham, kreditur, perusahaan pemasok dan karyawan perusahaan diberbagai negara. *Earnings management* juga terjadi di Bursa Efek Indonesia, seperti kasus PT Indofarma (Bapepam, 2004). Kasus Kimia Farma Tbk (Bapepam, 2002) dan kasus PT Davomas Abadi Tbk (Bapepam, 2004).

Menurut Scott (2006), *earnings management* timbul karena laba akuntansi dapat dijadikan sebagai indikator kinerja manajer, sehingga para investor dan calon investor lebih memusatkan perhatiannya pada informasi laba tersebut tanpa memperhatikan prosedur, metode dan pertimbangan (*judgement*) yang digunakan manajer perusahaan dalam menghasilkan laba perusahaan. Karena laba menjadi pusat perhatian para investor dan calon investor, maka ini mendorong manajer untuk mengatur laba yang dilaporkan dengan kata lain melakukan *earnings management*. *Earnings management* juga dapat diakibatkan karena adanya *agency problem* antara manajer (*agent*) dengan pemegang saham (*principal*). Menurut Jensen dan Meckling (1976) *agent* adalah individu yang *self interested*, maka ada alasan untuk percaya bahwa *agent* tidak selalu bertindak untuk kepentingan *principal*.

Agency problem yang ada antara *agent* dan *principal*, ini akan menimbulkan biaya yang disebut dengan *agency cost*. *Agency cost* adalah pengorbanan yang timbul akibat dari hubungan keagenan baik yang ditanggung oleh *principal* maupun yang ditanggung oleh *agent*. Menurut Jensen dan Meckling (1976), *agency cost* meliputi: 1) *monitoring cost*; 2) *bonding cost*; dan 3) *residual loss*. *Monitoring cost* adalah biaya yang ditanggung oleh *principal* untuk membatasi aktivitas-aktivitas *agent* yang menyimpang dari yang diharapkan oleh *principal*. *Bonding cost* adalah biaya untuk mengikat *agent*. Dan terakhir adalah *residual loss*, yaitu merupakan pengorbanan berupa berkurangnya kemakmuran

principal yang timbul akibat dari perbedaan antara keputusan *agent* dengan keputusan *principal*.

Agent (manajemen) bertanggungjawab kepada *principal* (pemegang saham). Dan alat pertanggungjawaban *agent* kepada *principal* ini berbentuk laporan yang biasanya disebut juga dengan pelaporan keuangan. Manajemen merupakan satu-satunya pihak yang memiliki akses langsung dengan perusahaan. Jadi dengan demikian, maka asimetri informasi akan terjadi. Sebagai individu yang *self interested*, manajemen (*agent*) akan selalu berusaha meningkatkan kemakmurannya tanpa memperhatikan kemakmuran *principal*. *Agent* akan selalu berusaha untuk menampilkan laporan yang menarik dan selalu berusaha mengelabui *principal* agar perilakunya yang telah merugikan *principal* akibat dari *self interested* tidak dapat diketahui oleh *principal*. Perilaku *agent* ini kemungkinan akan menampilkan laporan keuangan dengan laba yang telah diratakan, dinaikkan atau diturunkan sesuai dengan yang diinginkannya. Meratakan, menaikkan atau menurunkan laba inilah yang disebut dengan *earnings management*. Karena tidak menampilkan kinerja keuangan sebagaimana mestinya, maka laporan keuangan ini dapat menyesatkan para pemakai untuk membuat keputusan.

Earnings management yang terjadi belakangan ini membuat kepercayaan investor terhadap pasar modal menjadi menurun. Menanggapi menurunnya kepercayaan investor terhadap pasar modal, maka pemerintah Amerika Serikat telah mengeluarkan aturan yang terbit pada tahun 2002 dan dinamakan dengan Sarbanes Oxley Act (SOA/SOX) yang di antara pasalnya, yaitu pasal 301 mewajibkan perusahaan untuk memiliki Komite Audit. Pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan peraturan yaitu Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pasar Modal Nomor: KEP-41/PM/2003 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Peraturan Pencatatan Nomor 1-A tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa, Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No.315/BEJ/06/2000, perusahaan tercatat wajib memiliki komisaris independen yang jumlahnya proporsional dan sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan pemegang saham pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari seluruh anggota Dewan Komisaris. Dan Peraturan Ketentuan jumlah anggota komite audit bagi emiten BEI diatur dalam Surat Edaran Bapepam Nomor SE-03/PM/2000 dan Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia (BEI) Nomor Kep-315/BEJ/06/2000 menyebutkan bahwa keanggotaan komite audit sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang anggota, seorang di antaranya merupakan komisaris independen yang sekaligus merangkap sebagai ketua komite audit, sedangkan anggota lainnya merupakan pihak eksternal yang independen di mana sekurang-kurangnya satu di antaranya memiliki kemampuan di bidang akuntansi dan atau keuangan.

Seiring dengan makin meningkatnya kompleksitas dan tantangan perusahaan, komisaris yang berasal dari dalam perusahaan memiliki banyak kekurangan, tidak hanya faktor rendahnya independensi melainkan juga didorong oleh faktor keterbatasan kualitas individu komisaris internal, seperti: *lack of skill, knowledge, and information* (Syakhroza, 2004). Untuk menutupi kekurangan yang dimiliki oleh komisaris yang berasal dari dalam perusahaan tersebut, maka sangatlah diperlukan keberadaan komisaris independen. Komisaris Independen merupakan salah satu mekanisme monitoring karena komisaris independen sangat efektif untuk meminimalisasi masalah keagenan (*agency problem*) yang timbul antara manajemen (*agent*) dan pemegang saham (*principal*) karena keberadaan komisaris independen berasal dari luar perusahaan yang tidak memiliki hubungan bisnis dan hubungan keluarga dengan perusahaan.

Klein (2002) menyatakan bahwa independensi dari dewan komisaris dapat menurunkan *earnings management*. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Beasley (1996) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang negatif antara persentase anggota non-eksekutif dalam *board of directors* dan kecurangan laporan keuangan. Ini dapat terjadi karena anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan memiliki keahlian keuangan dan akuntansi dan dapat lebih objektif serta profesional dalam melaksanakan tugasnya karena mereka tidak memiliki kepentingan terhadap pihak manapun. Hal ini juga sejalan dengan OECD (2004) yang menyatakan bahwa fungsi kunci dewan komisaris antara lain untuk meyakini integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan korporasi. Oleh karena itu maka agar fungsi dewan komisaris tersebut dapat berjalan dengan baik, maka dewan komisaris harus memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai serta pemahaman masalah keuangan perusahaan dan termasuk membaca laporan keuangan (Moenaf, 2000). Latar belakang keuangan dari anggota dewan komisaris dapat menghambat *earnings management* (Xie *et al*, 2001).

Boynton, *et al* (2006) menyatakan bahwa komposisi komite audit memiliki dampak yang besar terhadap *earnings management*. Latar belakang keuangan dari anggota dewan komisaris dan komite audit berhubungan dengan *earnings management*. Frekuensi pertemuan dari dewan komisaris dan komite audit berhubungan negatif dengan tingkat *earnings management*. Aktivitas dan pengalaman keuangan dari anggota dewan komisaris dan komite audit merupakan faktor penting yang dapat menghambat *earnings management*. Penelitian Chtourou *et al* (2001) pada perusahaan yang *listed* di NYSE dengan memakai regresi, menjelaskan bahwa praktik *corporate governance* berpengaruh pada kualitas informasi keuangan. Mereka membuktikan bahwa *earnings management* signifikan berpengaruh dengan beberapa praktik *corporate governance* (*audit committee* dan *board of directors*).

Penelitian Xie *et al* (2001) yang dilakukan pada perusahaan yang *listed* di NYSE dengan memakai regresi menyimpulkan bahwa komposisi dari anggota dewan secara umum dan khususnya komite audit, berhubungan dengan *earnings management*. Latar belakang keuangan dari anggota dewan komisaris dan komite audit berhubungan dengan *earnings management*. Frekuensi pertemuan dari dewan komisaris dan komite audit berhubungan negatif dengan tingkat *earnings management*. Aktivitas dan pengalaman keuangan dari anggota dewan komisaris dan komite audit merupakan faktor penting yang dapat menghambat *earnings management*.

Penelitian yang dilakukan oleh Peasnell *et al* (2001) dengan menggunakan regresi menyatakan bahwa aktivitas *earnings management* yang terjadi pada perusahaan-perusahaan publik di Inggris tergantung pada *monitoring* dewan. Perusahaan dengan proporsi anggota *outside directors* tinggi berhubungan dengan menurunnya *income-increasing (earnings management)*, tetapi pada penelitian ini tidak menemukan bukti keberadaan komite audit dapat menghambat aktivitas *earnings management*.

Penelitian yang dilakukan oleh Klein (2002) pada perusahaan yang *listed* di NYSE dengan analisa regresi yang menguji hubungan antara *earnings management* dengan karakteristik komite audit dan *board of directors* menunjukkan hasil penelitiannya bahwa terdapat hubungan negatif antara independensi komite audit dan dewan komisaris dengan *earnings management* yang diukur dengan *abnormal accruals*.

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Apakah Proporsi Komisaris Independen dan Komposisi Komite Audit berpengaruh terhadap *Earnings Management*.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: Untuk mengetahui dan menganalisis apakah Proporsi Komisaris Independen dan Komposisi Komite Audit berpengaruh terhadap *Earnings Management*.

METODE

Objek penelitian ini adalah proporsi komisaris independen (X_1), komposisi komite audit (X_2), dan *earnings management* (Y). Proporsi Komisaris Independen adalah wakil dari pemegang saham minoritas yang bertanggungjawab mengatur dan memberikan pengarahan kepada manajemen yang berasal dari luar perusahaan yang tidak mempunyai hubungan bisnis dan hubungan keluarga dengan perusahaan, dengan indikator, yaitu jumlah keanggotaan dewan yang berasal dari luar perusahaan (*outside directors*) terhadap keseluruhan jumlah anggota dewan, minimal 30% atau sebanding dengan kepemilikan saham minoritas. Komposisi komite audit adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh komite audit dengan indikator sebagai berikut: 1) jumlah anggota minimal tiga orang; 2) jumlah anggota komite audit yang berasal dari komisaris independen minimal satu orang merangkap ketua; dan 3) paling sedikit satu orang dari anggota harus memiliki keahlian dibidang keuangan (Jayanthi Krishnan, 2005). *Earnings management* adalah kebijakan akuntansi yang dipilih oleh manajer untuk tujuan tertentu (Scott, 2006), yang dproksikan dengan *discretionary accrual* (DTAC) dihitung menggunakan Modified Jones' Model (Dechow, 1995).

Operasionalisasi Variabel. Variabel independen dalam penelitian ini adalah proporsi komisaris independen (X_1) dan komposisi komite audit (X_2), dan variabel dependennya adalah *earnings management* (Y). Agar penelitian ini dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan maka perlu dipahami konsep operasionalisasi dan indikator variabel penelitiannya sebagai berikut:

Proporsi Komisaris Independen (X_1). Dewan komisaris terdiri dari dewan komisaris yang berasal dari dalam perusahaan dan dewan komisaris dari luar perusahaan yang tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan bisnis dengan perusahaan, yang biasanya disebut dengan istilah komisaris independen (Mas Achmad, 2005) yang jumlahnya sesuai dengan aturan BEI, yaitu sama dengan persentase jumlah pemegang saham minoritas atau minimal 30% dari jumlah dewan komisaris. Informasi mengenai proporsi komisaris independen diperoleh dari laporan tahunan (*annual report*) masing-masing perusahaan.

Komposisi Komite Audit (X_2). Komite audit adalah sekelompok orang yang dibentuk untuk membantu dewan komisaris (Arens *et al*, 2006). Indikator dari Komposisi Komite Audit adalah sebagai berikut: 1) jumlah anggota minimal tiga orang; 2) jumlah anggota komite audit yang berasal dari komisaris independen minimal satu orang yang merangkap ketua; dan 3) paling sedikit satu orang dari anggota harus memiliki keahlian di bidang keuangan (Jayanthi Krishnan, 2005). Informasi mengenai komposisi komite audit diperoleh dari pelaporan tahunan (*annual report*) masing-masing perusahaan.

***Earnings Management* (Y).** *Earnings management* merupakan intervensi manajemen dalam proses penyusunan laporan keuangan bagi pihak eksternal sehingga dapat meratakan, menaikkan dan menurunkan pelaporan laba, dimana manajemen dapat menggunakan kelonggaran penggunaan metode akuntansi, membuat kebijakan-kebijakan

(*discretionary*) yang dapat mempercepat atau menunda biaya-biaya dan pendapatan agar laba perusahaan lebih kecil atau lebih besar sesuai dengan yang diharapkan (Scott, 2006), yang diprosikan dengan *discretionary accrual* (DTAC) dihitung menggunakan *Modified Jones' Model* (Dechow, 1995).

Untuk mengukur tingkat *earnings management* menggunakan *total accrual* (TAC) yang diklasifikasikan menjadi komponen *discretionary accrual* (DTAC) dan *non discretionary accrual* (NDTAC). *Non discretionary accrual* merupakan komponen *accrual* yang terjadi secara alami, sedangkan *discretionary accrual* merupakan komponen *accrual* yang berasal dari *earnings management* yang dilakukan manajer perusahaan.

Untuk mendapat nilai *discretionary accrual* (DTAC) dihitung menggunakan *Modified Jones' Model* (Dechow, 1995). Maka langkah pertama adalah mencari nilai *total accrual* (TAC) dengan rumus:

$$\text{Total accrual (TAC)} = \text{laba bersih (net income)} - \text{ arus kas operasi (cash flow from operation)}$$

Selanjutnya menghitung *total accrual* yang diestimasi dengan persamaan regresi OLS yaitu :

$$\text{TAC}_{i,t}/\text{TA}_{i,t-1} = \alpha_1(1/\text{TA}_{i,t-1}) + \alpha_2[(\Delta\text{REV} - \Delta\text{REC})/\text{TA}_{i,t-1}] + \alpha_3(\text{PPE}_{i,t}/\text{TA}_{i,t-1}) + \varepsilon_t$$

Dengan menggunakan koefisien regresi diatas ($\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$) maka dihitung nilai *non discretionary accrual* (NDTAC) dengan rumus:

$$\text{NDTAC} = \alpha_1(1/\text{TA}_{i,t-1}) + \alpha_2[(\Delta\text{REV} - \Delta\text{REC})/\text{TA}_{i,t-1}] + \alpha_3(\text{PPE}_{i,t}/\text{TA}_{i,t-1})$$

DTAC merupakan residual yang diperoleh dari estimasi *total accrual* yang dihitung sebagai berikut: $\text{DTAC}_t = \text{TAC}_t/\text{TA}_{t-1} - \text{NDTAC}$

Keterangan: TAC_t adalah *total accrual* ; DTAC adalah *discretionary accrual*; NDTAC adalah *non discretionary accrual*; $\text{TA}_{i,t-1}$ adalah *total asset* perusahaan periode t-1; ΔREV adalah perubahan pendapatan bersih dalam periode t; ΔREC adalah perubahan piutang bersih dalam periode t; PPE_t adalah *gross property plant and equipment* pada tahun t; ε_t adalah *errors*.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *discretionary accruals* sebagai proksi *earnings management* merupakan *error term*.

Data yang digunakan untuk menghitung nilai variabel *earnings management* adalah data silang tempat atau *cross sectional* untuk setiap sample yang diperoleh dari pelaporan tahunan (*annual report*). Adapun secara rinci operasionalisasi variabel penelitian ini adalah:

Tabel 1. Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel	Konsep	Indikator	Skala
Proporsi Komisaris Independen (X_1)	Wakil dari pemegang saham minoritas yang bertanggungjawab mengatur dan memberikan pengarahan kepada manajemen yang berasal dari luar perusahaan yang tidak mempunyai hubungan bisnis dan keluarga dengan perusahaan (Moenaf, 2000).	Jumlah keanggotaan dewan yang berasal dari luar perusahaan (<i>outside directors</i>) terhadap keseluruhan jumlah anggota dewan, minimal 30% atau sebanding dengan kepemilikan saham minoritas (BEI, 2000).	Rasio

Variabel	Konsep	Indikator	Skala
Komposisi Komite Audit (X ₂)	Komite Audit adalah sekelompok orang yang dibentuk untuk membantu dewan komisaris (Arens <i>et al</i> , 2006). Kualitas Komite Audit merupakan syarat yang harus dimiliki oleh komite audit.	Indikator Komposisi Komite Audit, yaitu: 1) jumlah anggota minimal tiga orang; 2) jumlah anggota yang berasal dari komisaris independen minimal satu orang yang merangkap sebagai ketua; dan 3) jumlah anggota yang memiliki keahlian di bidang keuangan minimal satu orang (Jayanthi Krishnan, 2005).	Rasio
<i>Earnings Management</i> (Y)	Intervensi manajemen dalam proses penyusunan laporan keuangan eksternal dengan cara memanipulasi laba secara aktif guna mencapai tingkat laba tertentu yang telah ditetapkan dalam upaya mencapai tujuan tertentu.	Nilai <i>Discretionary Accruals</i> dihitung dengan Modified Jones' Model (Dechow, 1995) sebagai berikut: $DTAC_t = TAC_t/TA_{t-1} - NDTAC$	Rasio

Populasi Penelitian. Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan konglomerasi yang listing pada Bursa Efek Indonesia. Perusahaan konglomerasi merupakan perusahaan dengan struktur kepemilikan bertingkat. Menurut *Indonesian Capital Market Directory* 2011 yang dikeluarkan oleh *Institute for Economic and Financial Research* (ECFIN) jumlah emiten yang terdaftar di BEI tahun 2010 sebanyak 402 perusahaan sedangkan perusahaan yang termasuk dalam perusahaan konglomerasi adalah 37 perusahaan. Data yang berhubungan dengan variabel proporsi komisaris independen, komposisi komite audir dan *earnings management* diperoleh dari laporan tahunan (*annual report*) perusahaan konglomerasi yang listing di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2010. Laporan keuangan yang digunakan adalah laporan keuangan yang telah diaudit dan telah diserahkan ke Bapepam dan Bursa Efek Indonesia. Dipilih tahun 2010 sebagai tahun pengamatan adalah karena pada saat dilakukan pengumpulan data, data terakhir yang tersedia adalah data tahun 2010. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *path analysis* dengan bantuan paket program SPSS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif Variabel Proporsi Komisaris Independen. Proporsi komisaris independen diukur dengan presentase keanggotaan dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan yang tidak memiliki hubungan bisnis dan keluarga dengan perusahaan dari masing-masing emiten yang sesuai dengan aturan BEI, yaitu sebanding dengan kepemilikan saham minoritas atau minimal 30% dari total anggota dewan komisaris. Data pada Tabel 2 menunjukkan bahwa rata-rata proporsi komisaris independen pada 37 perusahaan dari tahun pengamatan 2008-2010 adalah 38,57 % dan ini sudah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh pengelola pasar modal, yaitu 30%. Sementara yang dibawah rata-rata ada sebanyak 62,16% dari jumlah perusahaan yang diteliti dengan tahun pengamatan dari tahun 2008-2010. Dan diatas rata-rata adalah sebanyak 37,84%.

Tabel 2. Proporsi Komisaris Independen

Proporsi Komisaris Independen	Jumlah	Persentase
Rata-rata	0,3857	
Dibawah rata-rata	92	62,16%
Diatas rata-rata	56	37,84%

Sumber: Data Sekunder (diolah)

Analisis Deskriptif Variabel Komposisi Komite Audit. Komposisi komite audit diukur melalui tiga indikator, yaitu jumlah komite audit, jumlah komite audit yang berasal dari komisaris independen dan jumlah komite audit yang memiliki keahlian keuangan. Data pada tabel 3 menunjukkan bahwa perusahaan konglomerasi yang listing di Bursa Efek Indonesia sebagian besar, yaitu 90,54% telah memiliki komite audit tiga orang, kemudian sebesar 56,76% komite audit berasal dari komisaris independen sebanyak tiga orang serta 41,23% telah memiliki ahli keuangan sebanyak dua orang. Tabel 3 menunjukkan bahwa perusahaan konglomerasi yang listing di Bursa Efek Indonesia hampir semuanya telah memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bapepam, yaitu Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pasar Modal Nomor: KEP-41/PM/2003 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Bapepam mensyaratkan pembentukan komite audit di perusahaan publik Indonesia terdiri dari tiga orang yang diketuai oleh komisaris independen dengan dua orang eksternal yang independen serta sedikitnya satu orang anggota komite audit menguasai dan memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan. Jadi dengan demikian dari data yang diperoleh berarti hampir perusahaan konglomerasi yang listing di Bursa Efek Indonesia telah memenuhi peraturan yang dikeluarkan oleh Bapepam.

Tabel 3. Komposisi Komite Audit

Komposisi Komite Audit	Jumlah (Orang)	Jumlah (Tahun Perusahaan)
Jumlah Komite Audit	2	1 (0,67%)
	3	134 (90,54%)
	4	6 (4,06%)
	5	3 (2,03%)
	6	4 (2,70%)
	Komisaris Independen	1
2		36 (24,32%)
3		84 (56,76%)
4		9 (6,08%)
5		2 (1,35%)
Ahli Keuangan	1	29 (19,59%)
	2	61 (41,22%)
	3	53 (35,81%)
	4	1 (0,68%)
	5	2 (1,35%)
	6	2 (1,35%)

Sumber: Data Sekunder (diolah)

Analisis Deskriptif Variabel *Earnings Management*. *Earnings management* merupakan intervensi manajemen dalam proses penyusunan laporan keuangan bagi pihak eksternal yang diprosikan dengan *discretionary accrual* yang dihitung dengan menggunakan *Modified Jones Model* (Dechow, 1995).

Tabel 4. Indeks *Earnings Management*

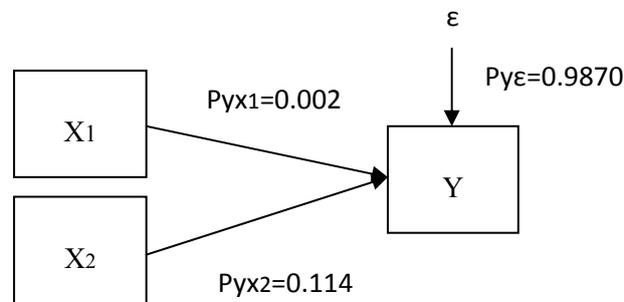
Indeks <i>Earnings Management</i>	Jumlah	Persentase
Rata-rata	0,136055	
Dibawah rata-rata	68	61,26%
Diatas rata-rata	43	38,74%

Sumber: Data Sekunder (diolah)

Data pada Tabel 4 menunjukkan bahwa rata-rata indeks *earnings management* pada perusahaan adalah sebesar 0,136. Artinya bahwa dari perusahaan yang diteliti dengan tahun pengamatan dari 2008-2010 semuanya melakukan *earnings management*. Sementara dari 37 perusahaan dengan tahun pengamatan dari tahun 2008-2010 yang memiliki nilai indeks *earnings management* di bawah rata-rata adalah sebanyak 61,26%, kemudian sisanya memiliki nilai indeks *earnings management* di atas rata-rata, yaitu 38,74%.

Perusahaan konglomerasi yang listing di Bursa Efek Indonesia semuanya masih melakukan *earnings management*, tetapi sebagian besar, yaitu 59,46% *earnings management*nya telah berada di bawah rata-rata. Hal ini berarti perusahaan telah menuju keperbaikan kualitas laporan keuangan, yaitu nilai komponen *earnings management* semakin mendekati nol. Ini bertanda bahwa kualitas laporan keuangan semakin membaik. Membaiknya kualitas laporan keuangan karena perhatian perusahaan terhadap komisaris independen sudah sedikit membaik, yaitu rata-rata perusahaan telah memiliki komisaris independen sebanyak 39,17% yaitu diatas syarat yang diwajibkan sebesar 30% dan komite audit pada perusahaan konglomerasi yang listing di Bursa Efek Indonesia semuanya telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan.

Analisis Pengaruh Proporsi Komisaris Independen dan Komposisi Komite Audit Terhadap *Earnings Management*. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *path analysis*. Berikut ini hasil pengolahan data yang diperoleh dengan bantuan SPSS. Secara diagram bentuk struktur variabel proporsi komisaris independen dan komposisi komite audit terhadap *earnings management* pada perusahaan konglomerasi yang listing di Bursa Efek Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Diagram Jalur pengaruh Proporsi Komisaris Independen (X_1) dan Komposisi Komite Audit (X_2) terhadap *Earnings Management* (Y)

Selanjutnya pengaruh proporsi komisaris independen (X_1) dan komposisi komite audit (X_2) terhadap *Earnings management* (Y) dapat dilihat pada Tabel 5 berikut:

Tabel 5. Pengaruh Proporsi Komisaris Independen (X_1) dan Komposisi Komite Audit (X_2) terhadap *Earnings Management* (Y)

Variabel	Koefisien Jalur	Pengaruh
Proporsi Komisaris Independen (X_1)	-0.002	0,000004
Komposisi Komite Audit (X_2)	0.114	0,013

$R^2 = 0,013$

Sumber: diolah

Besarnya pengaruh secara simultan dapat dilihat dari nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,013 atau sebesar 1,3%. Nilai ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama (simultan) pengaruh variabel proporsi komisaris independen (X_1) dan komposisi komite audit (X_2) terhadap *earnings management* (Y) adalah sebesar 1,3% sedangkan sisanya sebesar 98,7% ($1-R^2$) ditentukan oleh faktor lain diluar variabel yang diteliti.

Rendahnya pengaruh secara bersama-sama variabel proporsi komisaris independen (X_1) dan variabel komposisi komite audit (X_2) terhadap *earnings management*, yaitu sebesar 1,3% mengindikasikan bahwa terdapat banyak faktor lain yang mempengaruhi *earnings management*. Faktor lain tersebut adalah seperti kepemilikan manajerial (Jensen dan Meckling, 1976; San Ham, 2005; Warfield *et al*, 1995; Agrawal dan Knoeber, 1996; Morck *et al*, 1988), kepemilikan institusional (Agrawal dan Knoeber, 1996; Moh'd *et al*, 1998; dan Bushee, 1998); kompensasi CEO (Murphy, 1985; Watt dan Zimmerman, 1986), pasar modal (Agrawal dan Knoeber, 1996), *block holders*, dan pasar tenaga kerja manajerial (Agrawal dan Knoeber, 1996).

Dari tabel 5 dapat dilihat bahwa variabel proporsi komisaris independen (X_1) tidak terbukti dapat mempengaruhi besaran *earnings management*. Sedangkan variabel komposisi komite audit (X_2) terbukti dapat mempengaruhi *earnings management*. Selanjutnya pembahasan secara parsial pengaruh masing-masing variabel proporsi komisaris independen dan komposisi komite audit terhadap *earnings management* pada perusahaan konglomerasi yang listing di Bursa Efek Indonesia.

Pengaruh Proporsi Komisaris Independen terhadap *Earnings Management*.

Pengujian hipotesis penelitian menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen tidak terbukti dapat mempengaruhi besaran *earnings management* pada perusahaan konglomerasi yang listing di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori dan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap *earnings management* (Xie, 2001; Beasley, 1996; Peasnell *et al*, 2001; Chtourou, 2001).

Tidak berpengaruhnya proporsi komisaris independen terhadap *earnings management* disebabkan karena: 1) kecilnya proporsi komisaris independen yang ditetapkan oleh Bapepam, yaitu hanya sebesar 30% sehingga tidak dapat mengimbangi suara dewan komisaris dalam membuat keputusan jika terjadi pertentangan antara komisaris independen dengan komisaris dari dalam perusahaan. Menurut Lorsch (2000) jumlah komisaris independen harus diatas 50% agar dapat mengimbangi suara komisaris yang berasal dari dalam perusahaan; 2) Kebanyakan komisaris independen tidak ahli akuntansi dan keuangan, hal ini dapat dilihat dari *annual report*. Karena kebanyakan

mereka bukan ahli akuntansi dan keuangan, sehingga komisaris independen susah untuk mendeteksi adanya *earnings management*. Menurut Moenaf (2000), dewan komisaris harus terdiri dari berbagai bidang dan diantaranya harus ada ahli akuntansi dan keuangan karena fungsi kunci dewan komisaris diantaranya adalah meyakini integritas akuntansi dan sistim pelaporan keuangan korporasi (OECD, 2004); 3) Keberadaan komisaris independen di perusahaan bukan untuk menegakkan *corporate governance*, tetapi hanya sebagai pemenuhan regulasi (Mohamad Nur Sodik dalam KNKCG, 2002). Padahal *good corporate governance* dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan meningkatkan kinerja keuangan yang akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan investor yang bermuara meningkatkan harga saham dan menurunkan biaya modal (I Nyoman dkk, 2003); 4) Komisaris independen bekerja tidak profesional karena diangkat berdasarkan atas kedekatan hubungan dengan manajemen dan atau pemegang saham mayoritas (Herwidayatmo dalam FCGI, 2001). Menurut Moenef (2000) sebaiknya komisaris independen harus memiliki kompetensi, pengetahuan dan kemampuan memadai serta pemahaman masalah bisnis, keuangan dan akuntansi agar dapat mendeteksi transaksi-transaksi yang tidak wajar dalam perusahaan.

Pengaruh Komposisi Komite Audit terhadap *Earnings Management*. Pengujian hipotesis penelitian menunjukkan bahwa komposisi komite audit terbukti dapat mempengaruhi besaran *earnings management* pada perusahaan konglomerasi yang listing di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori dan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa komposisi komite audit berpengaruh terhadap *earnings management* (Jayanthi Krishnan, 2005; Joscelyne, 2004; Xie, 2001; Zaman, 2001; Rindova, 1999; Fama dan Jensen, 1983).

Besarnya pengaruh komposisi komite audit terhadap *earnings management* sangat kecil, yaitu hanya 1,3%. Kecilnya pengaruh komposisi komite audit terhadap *earnings management* disebabkan karena: 1) keberadaan komite audit bukan untuk menegakkan *corporate governance* tetapi hanya karena dorongan regulasi dan menghindari sanksi yang ada (Mohamad Nur Sodik dalam KNKCG, 2002). *Good Corporate governance* dapat meningkatkan nilai perusahaan, yaitu dengan meningkatkan kinerja keuangan. Dengan meningkatnya kinerja keuangan, ini akan meningkatkan kepercayaan investor. Jika kepercayaan investor meningkat, harga saham juga akan meningkat yang akhirnya dapat dengan mudah memperoleh modal dengan biaya murah (I Nyoman dkk, 2003); 2) Anggota komite audit tidak bekerja *full-time* pada perusahaan yang mengangkat mereka akibatnya anggota komite audit tidak banyak waktu untuk mengamati kebenaran dan kewajaran laporan keuangan. Sarbanas- Oxley (2002) telah mewajibkan perusahaan public di Amerika Serikat untuk mewajibkan komite audit bekerja *full-time* pada perusahaan yang mengangkat mereka (Aldrige, 2005).

PENUTUP

Kesimpulan. Berdasarkan rumusan masalah dan hipotesis penelitian serta analisis hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa proporsi komisaris independen dan komposisi komite audit secara simultan berpengaruh terhadap *earnings management* pada perusahaan konglomerasi yang listing di Bursa Efek Indonesia. Jadi, dengan bersinerginya komisaris independen dan komite audit dapat menurunkan besaran *earnings management*. Kecilnya pengaruh proporsi komisaris independen dan komposisi komite audit terhadap

earnings management secara simultan disebabkan banyaknya faktor lain yang mempengaruhi *earnings management*. Faktor lain tersebut antara lain adalah kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kompensasi CEO, pasar modal, *block holders*, dan pasar tenaga kerja manajerial.

Adapun pengaruh masing-masing variabel independen (proporsi komisaris independen dan komposisi komite audit) terhadap *earnings management* adalah sebagai berikut:

- a. Proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *earnings management*. Artinya proporsi komisaris independen tidak dapat mempengaruhi besaran *earnings management* yang terjadi pada perusahaan konglomerasi yang listing di Bursa Efek Indonesia. Komisaris independen yang ada pada perusahaan konglomerasi di Bursa Efek Indonesia tidak efektif karena tidak dapat mengurangi besaran *earnings management*. Komisaris independen pada perusahaan konglomerasi yang listing di Bursa Efek Indonesia tidak dapat bekerja sebagai mekanisme *corporate governance* yang berfungsi untuk memonitor perilaku manajemen yang berbentuk *earnings management*. Hal ini disebabkan karena keberadaan komisaris independen hanya untuk memenuhi regulasi bukan untuk menegakkan *corporate governance*, kebanyakan komisaris independen tidak ahli akuntansi dan keuangan serta jumlahnya juga tidak memadai hanya 30% dari total dewan komisaris.
- b. Komposisi komite audit berpengaruh sangat kecil terhadap *earnings management* pada perusahaan konglomerasi yang listing di Bursa Efek Indonesia. Hal ini disebabkan karena keberadaan komite audit yang ada pada perusahaan konglomerasi yang listing di Bursa Efek Indonesia bukan untuk menegakkan *corporate governance* tetapi hanya untuk memenuhi regulasi, komite audit tidak bekerja *full-time* di perusahaan yang mengangkat mereka sehingga tidak dapat mendeteksi adanya transaksi yang tidak wajar yang terjadi pada perusahaan.

Saran. Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, untuk lebih mendorong dan membangun praktik *corporate governance*, diberikan beberapa saran sebagai berikut:

Saran Pengembangan Ilmu: (a) Bagi peneliti, disarankan jika memakai variabel *earnings management* disarankan untuk melihat variabel lain yang mempengaruhi *earnings management* selain proporsi komisaris independen dan komposisi komite audit seperti kepemilikan manajerial, kompensasi CEO, kepemilikan institusional, pasar modal, pasar tenaga kerja manajerial dan *block holders*.; (b) Bagi para akademisi, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan yang berharga dalam pengajaran materi akuntansi keuangan terutama pembahasan tentang materi *earnings management* harus lebih diperhatikan.

Saran Operasional: (a) Bagi Regulator, disarankan agar dapat membuat kebijakan yang dapat meminimalisasi *earnings management* seperti menetapkan jumlah komisaris independen harus diatas 50% dari jumlah dewan komisaris bukan 30 % agar dapat menyeimbangi suara komisaris yang berasal dari dalam, dan mewajibkan emiten agar komite audit bekerja *full-time* diperusahaan yang mengangkat mereka agar dapat mendeteksi transaksi-transaksi yang tidak wajar.; (b) Bagi Perusahaan, diharapkan kesadaran akan pentingnya keberadaan komisaris independen dan komite audit. Keberadaan komisaris independen dan komite audit jangan hanya sekadar untuk memenuhi regulasi tetapi harus untuk menegakkan *corporate governance*, jadi harus profesional dan kompeten, jumlah komisaris independen sebaiknya lebih banyak dari

komisaris yang berasal dari dalam perusahaan dan sebagian besar dari komisaris independen harus yang ahli akuntansi dan keuangan. Dan mewajibkan komite audit dapat bekerja *full-time* diperusahaan agar dapat mendeteksi transaksi yang tidak wajar yang terjadi di perusahaan. Hal ini penting karena *Good Corporate Governance* dapat meningkatkan nilai perusahaan, yaitu dengan meningkatkan kinerja keuangan. Dengan meningkatnya kinerja keuangan, ini akan meningkatkan kepercayaan investor. Jika kepercayaan investor meningkat, harga saham juga akan meningkat yang akhirnya dapat dengan mudah memperoleh modal dengan biaya murah.

DAFTAR RUJUKAN

- Aldrige E. John dan Siswanto Sutojo (2005). *Good Corporate Governance. Tata Kelola Perusahaan Yang Sehat*. Jakarta: Penerbit Damar Mulia.
- Arens Alvin A, Elder Randal dan Beasley Mark (2006). *Auditing and Assurance Services An Integrated Approach. Tenth Edition. PHIPE International Edition* Prentice Hall.
- Bapepam. Siaran pers Badan Pengawas Pasar Modal Tanggal 27 Desember 2002. Melalui ([http://www. Bapepam. Co. id](http://www.Bapepam.Co.id)).
- _____, (2003). Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-41/PM/2003. Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Komite Audit.
- _____, (2004), *Annual Report*.
- Beasley, Mark S. (1996). An Empirical Analysis of the Relation Between the Board of Director Composition and Financial Statement Fraud. *The Accounting Review*, vol. 17. (4), p. 421-452.
- Boynton, W. C., N. J. Raymond an G. K. Walter (2006). *Modern Auditing. Seventh Edition. USA. Richard D. Irwin Inc. Corporation, Orlando, Florida*.
- Bursa Efek Jakarta (2000). Peraturan Pencatatan Efek. Nomor I-A: Tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa. Keputusan Direksi {T BEJ No. 315/BEJ/062000.
- Chtourou, S. M, Jean Bedard and Lucie Courteau (2001). *Corporate Governance and Earnings Management. Working paper. Universite laval, Quebec City, Canada. April*.
- Dechow P. M. Sloan and A. P. Sweeny (1995). Detecting Earnings Management. *The Accounting Review. Vol. 70. (2). April: 193-225*.
- Fama, E. F. and Jensen, M.C (1983). Separation of Ownership and Control. *Journal of Law and Economics*, 26: 301-326.
- Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) (2001). *Corporate Governance. Tata Kelola Perusahaan. Jilid 1 (Edisi ke-2)*.
- I. Nyoman dkk (2003). *Corporate Governance Tantangan dan kesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesia, Prenhallindo, Jakarta*.
- Jayanthi Krisnan (2005). Internal Control Quality and Audit Committee Quality: An Empirical Analysis. *Accounting Review*.
- Jensen, M and W. Meckling (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure, *Journal of Finance Economic*, vol.3, pp: 305-360.
- Joscelyne, J. G. (2004). Ballancing Relationship: Archieving Symmetry Among the Internal Audit Function Board Management than Ever, *Internal Auditor*, Februari.
- Klein (2002). Causes and Consequences of Variation in Audit Committee Composition . Working Paper. *Social Research Network*.

- Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) (2002). *The Essence of Good Corporate Governance: Konsep dan Implementasi Pada Perusahaan Publik dan Korporasi Indonesia*.
- Lorsch (2000). Empowering the Board. Harvard Business Review on Corporate Governance. The Harvard Business Review.
- Mas Achmad Daniri (2005). *Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia*.
- Moenaf H. Regar (2000). Dewan Komisaris: Peranannya sebagai Organ Perseroan. Jakarta. Bumi Aksara.
- OECD (2004). OECD Principles of Corporate Governance, *The OECD*, Paris.
- Peasnell, K. V., P. F. Pope dan S. Young (2001). Board Monitoring and Earnings Management: Do Outside Directors Influence Abnormal Accruals? *Accounting and Business Research* 30: 303-326.
- Rindova V. P (1999). What Corporate Boards Have to do with Strategy: a Cognitive Perspective. *Journal of Management Studies*. 36 (7). 953-975.
- Sarbanes-Oxley Act of (2002) (Sarbox), An Act., 107th Congress USA.
- Scott, William R. (2006). Financial Accounting Theory. International Edition. New Jersey : Prentice Hall.
- Syakhroza, Akhmad (2004). Model Komisaris untuk Efektivitas GCG di Indonesia, *Majalah Usahawan*, No.05 th XXXIII Mei 2004.
- Xie, B., W. N. Davidson., dan P. J. Dadalt (2001). Earnings Management and Corporate Governance: The Roles of The Board and The Audit Committee. *Working Paper Series*.
- Zaman, Mahbub (2001). Turnbull-Generating in Due Expectations of the Corporate Governance Role of Audit Committees. *Management Auditing Journal* 16/1/ pp: 5-9. MCB University Press

LAMPIRAN 1

Nama-nama Perusahaan Konglomerasi yang Listing di Bursa Efek Indonesia:

No	Kode	Nama Perusahaan
1	AALI	PT Astra Agro Lestari
2	ADMF	PT Adira Multi Finance Tbk
3	ADMG	PT Polychem Indonesia Tbk
4	AMAG	PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk
5	ASDM	PT Asuransi Dayin Mitra Tbk
6	ASGR	PT Astra-Graphia Tbk
7	AUTO	PT Astra Atoparts Tbk
8	BBLD	PT Buana Finance Tbk
9	BCAP	PT Bhakti Capital Indonesia Tbk
10	BLTA	PT Berlian Laju Tanker Tbk
11	BMTR	PT Global Mediacom Tbk
12	BNLI	PT Bank Permata Tbk
13	BTEL	PT Bakrie Telecom Tbk
14	CFIN	PT Clipan Finance Indonesia Tbk
15	CTRP	PT Ciputra Property Tbk
16	CTRS	PT Ciputra Surya Tbk
17	EPMT	PT Enseval Putera Megatrading Tbk
18	IGAR	PT Kageo Igar Jaya Tbk
19	LPGI	PT Lippo General Insurance Tbk
20	LPIN	PT Multi Prima Sejahtera Tbk
21	LPLI	PT Star Pacific Tbk
22	MNCN	PT Media Nusantara Citra Tbk
23	PAFI	PT Panasia Filament Inti Tbk
24	PANS	PT Panin Sekuritas Tbk
25	PLIN	PT Plaza Indonesia Realty Tbk
26	PNLF	PT Panin Financial Tbk
27	PTSP	PT Pioneerindo Gourmet International Tbk
28	RBMS	PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk
29	SCBD	PT Danayasa Arthatama Tbk
30	SIMA	PT Siwani Makmur Tbk
31	SKLT	PT Sekar Laut Tbk
32	TBLA	PT Tunas Baru Lampung Tbk
33	TRUS	PT Trust Finance Indonesia Tbk
34	UNSP	PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk
35	UNTR	PT United Tractor Tbk
36	WEHA	PT Panorama Transportasi Tbk
37	WOMF	PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk

LAMPIRAN 2

Output SPSS:

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.115 ^a	.013	-.010	.4953051	2.392

a. Predictors: (Constant), Komposisi Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen

b. Dependent Variable: Earnings Management

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	-1.493	.517		-2.888	.005
	Proporsi Komisaris Independen	-.012	.569	-.002	-.021	.983
	Komposisi Komite Audit	.591	.559	.114	1.057	.293

a. Dependent Variable: Earnings Management